

ABSTRAK

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang PNS. Pembahasan penulisan meliputi dasar hukum Pengadilan Negeri Kendal dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ini menjadi menarik dalam penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Kdl)”, tujuan penelitian mengetahui dasar hukum Pengadilan Negeri Kendal dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh di inventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematika dan terintegrasi mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum Pengadilan Negeri Kendal dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Nomor 133/Pid.B/2018/PN Kdl adalah terpenuhinya unsur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu penipuan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tidak adanya kendala dalam perkara ini karena alat bukti yang didapat selama proses pemeriksaan sudah jelas, seperti transferan yang telah diakui oleh Terdakwa sehingga dapat mempercepat jalannya persidangan. pemerintah harus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dalam seleksi dan perlu adanya lembaga atau pihak yang menjadi pengawas dari adanya setiap seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

KATA KUNCI : CPNS, Tindak Pidana, Penipuan.

ABSTRACT

Some people think that their future until their old age with their family will be guaranteed if they can become a civil servant. The discussion of the writing covers the legal basis of the Kendal District Court and the Judge's consideration in imposing criminal offenses against the perpetrators of fraud in the acceptance of Candidates for Civil Servants. /Pid.B/2018/PN Kdl) ”, the purpose of this research is to find out the legal basis of the Kendal District Court and the Judges' considerations in imposing criminal offenses against the perpetrators of fraud in the acceptance of prospective civil servants.

In this study using descriptive analytical research specifications. is intended to provide as accurate a data as possible about a person, condition or particular phenomenon. The approach method used in this study is a sociological juridical approach. Sociological juridical approach is to identify and conceptualize law as real and functional social institutions in real life systems. Data analysis uses qualitative juridical methods, namely all data obtained in the inventory, thoroughly reviewed and researched, systematically and integrated to achieve clarity on the issues to be discussed.

The results of this study indicate that the legal basis for the Kendal District Court in imposing criminal offenses against the perpetrators of criminal fraud Candidates for Civil Servants in Case Number 133 / Pid.B / 2018 / PN Kdl is the fulfillment of the elements in the provisions of Article 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 64 paragraph (1). The Criminal Code, namely fraud continuously as an act that is continued, then the Panel of Judges obtained evidence and conviction that all elements of the first alternative indictment of Article 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code have been proven and fulfilled, then the Defendant has been legally proven and convincing guilt, there was no obstacle in this case because the evidence obtained during the examination process was clear, such as transfers that had been admitted by the Defendant so that it could speed up the proceedings of the trial. The government must increase law enforcement efforts against fraud perpetrators in the selection and there needs to be an institution or party that monitors the selection of candidates for civil servants (CPNS).

KEY WORDS : CPNS, Criminal Act, Fraud.